

FUNGSI INTERMEDIASI LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN PERTANIAN DI JAWA BARAT

TUTI KARYANI

Universitas Padjadjaran

email korespondensi: t.karyani@unpad.ac.id

Abstrak

Saat ini di perdesaan banyak bermunculan lembaga keuangan (LK) tetapi justru permasalahan kelangkaan modal (*lack of capital*) masih sangat dirasakan oleh petani dan UMKM agribisnis. Secara umum sikap *risk averse* LK terhadap sektor pertanian dan perdesaan masih tinggi, sehingga fungsi intermediasi Lembaga Keuangan Perdesaan tidak berjalan baik. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat dengan pendekatan makro menggunakan analisis regresi panel dan secara mikro, menggunakan SEM. Hasilnya menunjukkan bahwa secara makro fungsi intermediasi LK dipengaruhi oleh DPK, NPL dan SBI. Kredit ternyata berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga dapat dijelaskan mengapa kemiskinan di Jawa Barat sulit berkurang selama fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik. Secara mikro fungsi intermediasi direfleksikan dari kualitas pelayanan yang ternyata berpengaruh positif terhadap kinerja usaha dan keberlanjutan usaha petani dan UMKM agribisnis.

Kata Kunci: Fungsi Intermediasi, kelangkaan modal

Abstract

Nowadays there are various rural financial institutions (RFI), but unfortunately farmers and agribusiness SMEs are still face lack of capital. In general, risk averse attitudes among RFIs upon agricultural and rural sectors were still dominant, so intermediary function of RFI was not running well. The research was conducted in West Java with at macro level using panel regression analysis and at micro level using the SEM. The results at the macro level show that RFI intermediation function was affected by DPK, NPL and the SBI. Amount of credit disburse reduce poverty level. So that poverty in West Java was difficult to be reduce as long as intermediary role of RFI was not well function. On the micro level the intermediary function reflected on the quality of service which turns a positive effect on business performance and sustainability of farmers and agribusiness SMEs.

Key words: Intermediary function, lack of capital

Pendahuluan

Pentingnya kredit dalam pembangunan pertanian Indonesia terkait dengan tipologi petani yang sebagian besar merupakan petani kecil dengan penguasaan lahan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemupukan modal untuk investasi pada teknologi baru. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh De Soto (2000) bahwa *investment is the engine for economic growth. Access to financial services can provide access to the production means required to increase agricultural productivity and scale that lead to higher incomes*. Pemilikan lahan yang sempit dan skim pembiayaan bagi usaha tani dan UMKM agribisnis yang rigid, menyebabkan masyarakat tani tidak dapat mengakses secara mudah sumber pembiayaan formal, sehingga sektor ini cenderung terabaikan. Kondisi ini dapat dilihat dari data bahwa hanya sekitar 2%-3% kredit yang dikucurkan terhadap sektor pertanian, demikian juga bila di segmentasikan lagi dari kredit untuk UMKM, tetap saja kredit UMKM untuk sektor pertanian hanya sekitar 3 persen.

Sebenarnya di daerah perdesaan terdapat bentuk-bentuk kelembagaan pembiayaan non formal yang sudah berkembang (Uphoff, 1986; Hastuti dan White, 1979) seperti pedagang output, pedagang input,

arisan, kelompok pengajian dan sebagainya, namun potensi lembaga keuangan formal harus tetap diupayakan seoptimal mungkin karena lembaga tersebut mempunyai tugas dan kewajiban yang dibebankan pemerintah sebagai *agent of trust* dan *agent of development*. Yang dimaksud sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan dari dan untuk masyarakat. Sebagai *agent of development* adalah sebagai lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Oleh karena itu menarik untuk dikaji (1) bagaimana LK menjalankan fungsi intermediasinya dan factor apa yang mempengaruhinya (2) Bagaimana pengaruh kredit sebagai objek yang diintermediaskan terhadap kemiskinan (3) Bagaimana penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan Lembaga Keuangan Perdesaan (LKP) sebagai proksi fungsi intermediasi serta pengaruhnya terhadap kinerja usaha dan sustainabilitas usaha petani dan UMKM agribisnis.

Metode

Objek yang diteliti yaitu lembaga keuangan formal dengan alasan lembaga ini memiliki fungsi sebagai *agent of development*. Adapun tempat penelitian dilakukan di Jawa Barat (Jabar) dengan alasan karena rata-rata pangsa kredit pertanian Jawa Barat terhadap total kredit pada 3 tahun terakhir sekitar 3,8% (Bank Indonesia, 2009), padahal Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi utama padi nasional dengan luas panen 1.950.203 Ha dengan jumlah produksi 11 322 681 ton (BPS, 2009). Demikian juga bila dilihat dari jumlah penduduknya yang bekerja di sektor pertaniannya proporsinya tertinggi yaitu 40% dari keseluruhan sektor ekonomi (BI, 2010). Namun demikian, Jawa Barat sebagai propinsi terdekat dengan ibukota negara, ternyata jumlah penduduk miskinnya, pada bulan Maret 2009 sebanyak 4.983.570 orang (11,96 persen) dan yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 49,21 persen.

Selanjutnya untuk kepentingan pendekatan mikro, penetapan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik *multistage cluster sampling method* terdiri atas suatu seri klaster berdasarkan persamaan kriteria (Nan Lin, 1976). Terpilih Kabupaten Indramayu terdiri atas kecamatan Haur Geulis dan Loh Bener; Kabupaten Garut terdiri atas Kecamatan Cisarupan dan Cikajang.

Teknik analisis yang digunakan untuk pendekatan makro menggunakan regresi panel dengan variabel kinerja bank yaitu LDR, DPK, NPL, SBI(t-1) selama kurun waktu 2004-2009 per tri wulan dengan data kelompok bank; untuk pengaruh kredit terhadap kemiskinan menggunakan data cross section-nya kabupaten dan data series tahun 2004 – 2009. Adapun untuk pendekatan mikro digunakan analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan sampel sebanyak 225 orang.

Hasil dan Pembahasan

Kinerja Bank di Jawa Barat dalam Menjalankan Fungsi Intermediasinya

Berdasarkan perolehan PDRB Jawa Barat pada tahun 2010, menunjukkan kontribusi tertinggi berasal dari kegiatan industri dan pengolahan (26%), kemudian perdagangan, hotel & restoran 17%, sedangkan pertanian ada pada peringkat ke 3. Artinya pertanian masih memiliki arti penting bagi perekonomian Jawa Barat (BPS Jawa Barat, 2010). Walaupun demikian bila dikaitkan dengan ketenagakerjaan yang masih menampung pangsa yang besar (40%), kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi teknologi, yang pada gilirannya terkait dengan kemampuan untuk memperoleh modal.

Menurut Agrawal (2001) pertumbuhan ekonomi

suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Hal ini disebabkan karena sektor keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi intermediasinya guna menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkannya. Fungsi intermediasi dalam dunia perbankan ditunjukkan dari LDR (*Loan to Deposit Ratio*), yang dalam mekanismenya dipengaruhi oleh kinerja bank lainnya, yaitu DPK, NPL dan SBI dan analisis hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Variabel jumlah Dana Pihak Ketiga, *non-performing loan*, dan suku bunga Bank Indonesia, secara simultan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat penyaluran kredit, dilihat dari nilai R² yaitu sebesar 0,91 atau 91%, sedangkan sisanya yaitu 9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti tingkat bunga masing-masing bank, jumlah modal bank dan tingkat keuntungan bank. Adapun untuk pengaruh masing-masing variabel Dana Pihak Ketiga, *non performing loan* dan suku bunga BI terhadap tingkat penyaluran kredit, dilakukan pengujian parsial uji t atau bisa dilihat dari *probability*-nya, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut masing-masing berpengaruh secara signifikan

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Regresi Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi

Variabel	Estimasi	t-Statistic	Prob.	Keterangan
C	124,41	7,546991	0,0000	Nyata pada $\alpha=5\%$
DPK	-8,52X10 ⁻⁷	-3,897151	0,0002	Nyata pada $\alpha=5\%$
NPL	-1,94	-3,274911	0,0015	Nyata pada $\alpha=5\%$
SBI	-0,48	-1,631082	0,1066	Nyata pada $\alpha=10\%$
AR(1)	0,95	39,23363	0,0000	Nyata pada $\alpha=5\%$
Fixed Effects (Cross)				
_A--C	47,37	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank BUMN		
_B--C	18,52	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank Swasta Nasional		
_C--C	-54,24	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok Bank Swasta Asing+campuran		
_D--C	-11,65	Tambahan nilai konstanta untuk Kelompok		

Keterangan:

DPK = Dana Pihak Ketiga

NPL = Non-performing loans

SBI = Sertifikat Bank Indonesia

Konstanta sebesar 124,41 persen menunjukkan rata-rata penyaluran kredit jika jumlah dana pihak ketiga, *non-performing loan*, dan suku bunga Bank Indonesia sama dengan nol. Secara empiris di lapangan kondisi ini bisa terjadi pada semua bank ketika pada tahap awal pendirian dalam rangka menarik nasabah ketika DPK masih nol sehingga sangat tergantung pada modal sendiri.

Jumlah dana pihak ketiga memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 9,5 X 10⁻⁷ persen, artinya bahwa setiap peningkatan jumlah dana pihak ketiga sebesar 10 triliun rupiah akan menurunkan penyaluran

kredit sebesar 8,5 persen, dengan asumsi nilai koefisien regresi variabel bebas lain tetap, artinya jumlah dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Hasil analisis ini menarik untuk dikaji karena tidak sesuai teori yaitu bila DPK meningkat maka diprediksi akan meningkat pula jumlah kredit yang disalurkan, tetapi kenyataannya pada kasus ini terjadi sebaliknya yaitu ketika DPK meningkat tetapi LDR menurun. Dengan memperhatikan rumus LDR maka hubungan antara jumlah kredit dengan jumlah DPK merupakan rasio, maka kejadian ini dapat dijelaskan secara logis, yaitu bahwa ketika DPK meningkat, bank membuat strategi pengaturan portofolio untuk menekan risiko disamping juga meningkatkan profitnya serta memberikan indikasi bahwa telah terjadi *credit rationing*.

Non-performing loan memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 1,94 persen artinya bahwa setiap peningkatan *non-performing loan* sebesar 1 persen diprediksi akan menurunkan penyaluran kredit sebesar 1,94 persen dengan pengaruh signifikan pada tingkat kekeliruan 5 persen. Tinggi rendahnya NPL ini memberikan indikasi atas reputasi kerja manajemen, selain itu NPL juga memberi indikasi terhadap kondisi manajemen risiko lembaga keuangan.

Pengujian statistik secara parsial untuk SBI bertanda negatif sebesar 0,48 persen pada tingkat kesalahan 10 persen diputuskan untuk menolak H_0 dan H_a diterima yang berarti bila SBI meningkat 1 persen, maka LDR menurun 0,48 persen. Walaupun demikian sebenarnya mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam bentuk SBI ini memang bekerja memerlukan waktu (*time lag*). Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate biasanya lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit dengan segera.

Persamaan pada regresi ialah model autoregresif AR (1) sebesar 0,95 persen artinya LDR yang lalu mempengaruhi LDR sekarang 0,95 persen. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh pengelompokan bank, yang membedakannya ialah dari konstanta model fungsi regresinya. Kelompok bank diberi notasi A sampai dengan D. Dari persamaan modelnya dapat diartikan bahwa ada pengaruh kepemilikan yaitu bank milik pemerintah (BUMN) tingkat kemauan untuk menyalurkan kreditnya paling tinggi, berikutnya Bank Swasta Nasional, Bank BPR dan terakhir Bank Swasta Asing dan Campuran. Dengan demikian maka perlu perhatian BI agar memberikan dorongan kepada kelompok bank tersebut dalam menyalurkan kreditnya. Untuk BPR, walaupun tambahan nilai konstanta negatif tetapi masih lebih besar dari 100 persen akumulasinya, diduga karena modal sendiri kelompok BPR yang masih rendah sehingga kemampuan menyalurkan kreditnya juga lebih rendah. Namun untuk Jawa Barat saat penelitian ini dilakukan sedang dalam proses konsolidasi BPR antara lain melakukan restrukturisasi

manajemen dan masuknya BJB sebagai pemilik utama BPR pemda (51%).

Dari nilai konstanta yang berbeda ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja bank termasuk LDR. Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian BI yang melakukan untuk cakupan Indonesia (131 bank), yang menunjukkan bahwa kinerja bank ada sedikit keterkaitan dengan struktur kepemilikan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh manajemen (Hadad M,dkk, 2003). Namun hasil kajian Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) di 60 negara yang antara lain menyimpulkan bahwa kepemilikan bank sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kinerja bank tersebut, yang lebih berpengaruh adalah manajemennya. Oleh karena itu, kunci keberhasilan bank dalam membuat kepatuhan manajemen terhadap pemiliknya dimulai dari pemilihan manajemen.

Selanjutnya hasil analisis pengaruh kredit yang disalurkan terhadap kemiskinan diperoleh sebagai mana pada Tabel 2

**Tabel 2. Hasil Estimasi Model Regresi
Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan (dalam lon)**

Variabel	Koefisien	t statistik	Probabilitas	Keterangan
C	15,11	14.62206	0.0000	Nyata pada $\alpha = 5\%$
Kredit	-0,22	-4.542087	0.0000	Nyata pada $\alpha = 5\%$
JKL	-0,015	-0.415414	0.6788	Tidak signifikan
PDRB	-0,013	0.148717	0.8821	Tidak signifikan
AR (1)	0,526	9.732046	0.0000	Nyata pada $\alpha = 5\%$
R-squared	0,99			
Prob(F-statistic)	0,0000	D-W	2,13	
F-statistic	374,78			

Dilihat dari nilai R^2 yaitu sebesar 0,99 atau 99%, artinya kredit, jumlah lembaga keuangan, dan PDRB per kapita secara simultan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penyaluran kredit sebesar 99% sedangkan sisanya yaitu 1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Untuk pengujian hipotesis secara simultan disimpulkan bahwa secara simultan besarnya kredit, jumlah lembaga keuangan, PDRB per kapita memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5% hanya jumlah kredit yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Untuk jumlah lembaga keuangan dan PDRB perkapita secara parsial ternyata tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Persamaan regresi panel pada Tabel 2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: konstanta 15,15 menunjukkan rata-rata penduduk miskin 15,15% dari keseluruhan penduduk jika jumlah kredit yang disalurkan, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan perdesaan dan PDRB perkapita sama dengan nol. Kondisi ini mendekati fakta bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada Tahun 2010 sebesar 12,74% yang tertinggi di Kabupaten Bogor dan terendah di Kotif Banjar.

Sejalan dengan fakta, ternyata dari hasil analisis regresi juga bila dilihat konstanta tambahan untuk per kabupaten ternyata tertinggi di Kabupaten Bogor yaitu 1,47% dan terendah di Kotif Banjar (-2,81%). Hasil uji pengaruh AR(1) terhadap tingkat kemiskinan secara parsial 52,3% dipengaruhi secara positif oleh kemiskinan periode sebelumnya secara signifikan.

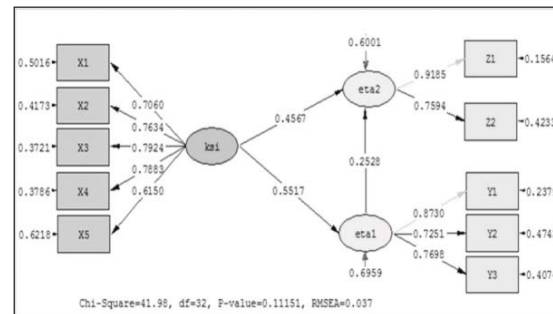
Dengan hasil analisis regresi panel tersebut dapat dikatakan bahwa kredit berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga sejalan dengan paradigma teori moneter baru yang berpandangan bahwa ketersediaan kredit (*quantity of credit*) akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan bukan *quantity of money* (Stiglitz dan Greenwald, 2003). Oleh karena itu, bank sangat berperan dalam menentukan perilaku perekonomian secara keseluruhan (*institutional economics*) sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi dari pihak yang *surplus of fund* dengan *deficit of fund*. Kaitan dengan peran kredit dalam mereduksi kemiskinan, memerlukan pengawasan yang cermat dalam penggunaannya agar tidak terjadi fungibility. Selain itu, pengaruh kredit juga dalam transmisinya memerlukan waktu dan proses yaitu dengan adanya kredit akan menarik kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan daya beli sehingga bisa mendorong keluarga keluar dari kelompok penduduk miskin. Fenomena bahwa kredit investasi pengaruhnya terasa dalam jangka panjang juga terjadi di Afrika Selatan dan di beberapa negara lainnya (ADB, 2001; Allen dan Ndikumana, 1998).

Pengaruh faktor PDRB yang tidak signifikan menunjukkan bahwa walaupun PDRB tinggi tetapi karena merupakan perhitungan rata-rata, maka tidak menunjukkan adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Adapun untuk jumlah lembaga keuangan yang tidak signifikan memberikan indikasi bahwa masyarakat masih belum memiliki akses yang tinggi terhadap pelayanan bank walaupun jumlah bank sudah meningkat. Penelitian Pie Guo di China (2009) bahkan menyebutkan bahwa lembaga-lembaga keuangan di Cina tampaknya justru telah merampok uang kaum miskin untuk dipinjamkan kepada orang kaya di perkotaan, sehingga akhirnya dilakukan reformasi kebijakan yang ternyata hasilnya cukup baik, yaitu munculnya kompetisi pelayanan dari lembaga keuangan terhadap masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, fenomena menyerbunya lembaga keuangan ke perdesaan perlu disikapi dengan baik dan bijaksana yang disertai pengawasan yang proporsional oleh Bank Indonesia.

Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Terhadap Kinerja Usaha dan Keberlanjutan Usaha Nasabah

Secara mikro pengaruh fungsi intermediasi diproksi dari penilaian nasabah terhadap kualitas pelayanan LKP. Setelah pengujian asumsi yang menunjukkan bahwa data valid dan *reliable*, untuk variabel baik

fungsi intermediasi, kinerja usaha dan keberlanjutan usaha. Adapun untuk uji normalitas multivariate menunjukkan data tidak normal p-value ($< 0,05$). maka metode estimasi yang cocok digunakan untuk menguji pengaruh fungsi intermediasi terhadap sustainabilitas melalui variabel kinerja usaha sebagai variabel antara adalah metode *robust maximum likelihood*. Pada uji kecocokan model (*goodness of fit*) menyimpulkan bahwa model dapat diterima, artinya model yang diperoleh dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan. Hasil analisis seperti terlihat pada Gambar 1.



Fungsi intermediasi (ksi) dapat memberikan penjelasan sebesar $(0,55172 \times 100\%) = 30,44\%$ terhadap kinerja usaha petani dan UMKM berbasis agribisnis (eta1) dan sisanya sebesar 69,56% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kemudian secara bersama-sama fungsi intermediasi dan kinerja usaha memberikan penjelasan sebesar 39,99% terhadap sustainabilitas petani dan UMKM berbasis agribisnis (eta2), sedangkan sisanya sebesar 60,01% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti yang berkontribusi terhadap sustainabilitas (keberlanjutan usaha). Artinya model SEM yang mengacu pada berjalannya fungsi intermediasi sudah baik dan signifikan walaupun hanya memberikan penjelasan 30% sampai 40%, karena faktanya banyak faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dan juga keberlanjutan usaha.

Simpulan

1. a. Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan (LK) pada tingkat makro di Jawa Barat pada kurun waktu 2004-2009, memberikan indikasi adanya penyaluran dana kepada instrumen keuangan lain selain kredit atau ke sektor lain (*capital flight*), bahkan ada indikasi telah terjadi *credit rationing*, dilihat dari DPK (dana pihak ketiga) yang hubungannya negative dengan LDR. Variabel NPL (*nonperforming loan*) sebagai indikator risiko, mempengaruhi fungsi intermediasi dengan hubungan negatif, karena akan berkontribusi terhadap kesehatan bank. Demikian juga BI rate (Suku Bunga Setifikat Bank Indonesia) sebagai instrument kebijakan BI masih dijadikan acuan bank walaupun dalam transmisinya memerlukan waktu (*time lag*).

- b. Fungsi intermediasi Bank milik pemerintah lebih baik dibandingkan dengan Bank milik swasta, hal ini sesuai dengan *agency theory* yaitu orientasi perusahaan tergantung dari orientasi pemilik (*principal*).
2. Fungsi intermediasi LK yang ditunjukkan dari jumlah kredit yang disalurkan, berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yaitu semakin besar nilai kredit yang disalurkan maka kemiskinan akan berkurang. Hal ini menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori Nurkes yaitu investasi (dalam hal ini melalui kredit) dapat memutus rantai kemiskinan.
3. Berdasarkan penilaian dari nasabah, fungsi intermediasi lembaga keuangan perdesaan yang paling baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional diantara LKP BRI Unit, BPR dan Koperasi ialah BRI Unit. Kunci keberhasilan dari BRI Unit ialah karena adanya "mantri" sebagai ujung tombak (agen) yang menjembatani hubungan antara BRI Unit dengan nasabahnya. Pada fungsi intermediasi ini, hubungan agensi bukan hanya terjadi antara pemilik LKP dengan manajemen tetapi antara LKP dengan nasabahnya. Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa fungsi intermediasi pada tingkat makro (diproksi dari LDR) dinilai kurang baik, tetapi pada tingkat mikro sudah cukup baik.
4. Fungsi intermediasi berpengaruh positif terhadap kinerja usaha terutama dalam penguatan modalan dan produktivitas adapun untuk peningkatan teknologi masih belum terrefleksikan dengan baik. Fungsi intermediasi dan kinerja usaha berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha baik langsung maupun tidak langsung terutama dalam meningkatkan kemampuan mendapat keuntungan.

Daftar Pustaka

- ADB. 2001. *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. Manila. Asian Development Bank.
- Agrawal, J.D. and Agrawal, Aman. 2001, *Liberalization of Capital Flows, Banking System & Trade: Focus on Crisis Situations, International Review of Comparative Public Policy* titled *International Financial Systems and Stock Volatility Volume 13*, pp.151-212.
- Allens, Donald S dan Leonce Ndikumana .1998. *Financial Intermediation and Economic Growth in Southern Africa. Working Paper 1998-004B*. Melalui: <http://research.stlouisfed.org/wp/1998/98-004.pdf> federal reserve bank of st. Louis
- Bank Indonesia, 2009. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan I 2009*. Kantor Bank Indonesia. Jawa Barat.
- Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) *"Banking System Around the Globe : Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability ?"*, February 2000.
- BPS, 2009. *Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No. 27/07/32/Th. XI*, 1 Juli 2009.
- _____, 2010. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi*, Maret 2009. Jakarta
- De Soto, Hernando. 2000. *The Mystery of Capital. New York: Basic Books*
- Hadad, Muliawan D., Wimboh Santoso, Dwityapoetra S 2003. *Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia: Apakah*

- Bunga Kredit Bank Umum Overpriced? Oktober 2003*.BI. www.bi.go.id/Studibiayaintermediasibbrpbankbesar.pdf [23/1/2010]
- Hastuti E.L. dan Benjamin White. .1979. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Skala Kecil di Enam Desa Contoh di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, Jawa Barat*. Bogor. SDP/ SAE Bogor.
- Nan Lin, 1976. *Foundations of Social Research*. Mc Graw-Hill, Departement of Sociology State University of New York, Albany
- Parasuraman, A. Valarie, A. Zeithaml, & L. Berry, 1998. *Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality*, Journal of Marketing, Vol. 52, pp.35-48.
- Pei Guo , 2009. *The structure and reform of rural Finance in China. China Agricultural Economic Review*, Vol. 1 No. 2, 2009, Emerald Group Publishing Limited. Center for Chinese Agricultural Policy, China Academy of Sciences, Beijing, People's Republic of China. Beijing.
- Stiglitz and Greenwald, (2003). *Toward a New Paradigm in Moneraty Economics*. Cambridge University Press. www.Amazon.com/Paradigm_economics. Raffaele Mattioli
- Uphoff ,Norman. 1986. *Local Institutional Development. An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.